

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

##### 4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### a. Sejarah Singkat Kabupaten Tulungagung

Nama Tulungagung sebenarnya berasal dari dua kata 'Toeloeng dan Agoeng. Arti dari dua kata itu Toeloeng berarti mata air dan Agoeng berarti besar. Sebelumnya nama kota ini adalah Kabupaten Ngrawa. Penyebutan kata Ngrawa sendiri konon dari banyaknya daerah berawa yang ada atau dalam bahasa Jawa "Ngrowo". Tulungagung awalnya hanya merupakan bagian dari distrik dari kabupaten Ngrawa.

Dahulu kala Tulungagung terkenal dengan daerah rawa-rawa, yang lebih dikenal dengan nama Bonorowo/ngrowo (rowo=rawa). Bekas rawa-rawa tersebut kini menjadi wilayah kecamatan Campurdarat, Boyolangu, Pakel, Besuki, Bandung, Gondang. Dalam prasasti Lawadan, terletak di sekitar Desa Wates Kecamatan Campurdarat, yang dikeluarkan pada Jum'at Pahing 18 Nopember 1205 disebutkan bahwa Raja Daha yang terakhir yaitu Sri Kretajaya merasa berkenan atas kesetiaan warga Thani Lawadan terhadap raja ketika terjadi serangan musuh dari sebelah timur Daha. Tanggal tersebut kemudian digunakan sebagai hari jadi tulungagung. Pada Prasasti Lawadan dijelaskan juga tentang anugrah Raja Kertajaya berupa pembebasan dari berbagai pungutan pajak dan

penerimaan berbagai hak istimewa kepada DWAN RI LAWADAN TKEN WISAYA, atau dikenal dalam cerita sebagai DANDANG GENDHIS. Di jaman majapahit, Bonorowo dipimpin oleh seorang Adipati yang bernama adipati kalang. Adipati kalang tidak mau tunduk pada kekuasaan majapahit, yang berujung pada invasi mojopahit ke bonorowo. Adipati kalang dan pengikutnya yang berjuang dengan gagah berani akhirnya tewas dalam pertempuran didaerah yang sekarang disebut kalangbret dikecamatan Kauman.

Di Jaman penjajahan jepang, tulungagung dijadikan base pertahanan jepang untuk menangkal serangan sekutu dari australia serta sebagai benteng pertahanan terakhir untuk menghadapi serangan dari arah utara. Pada masa itu ratusan ribu romusa dikerahkan untuk mengeringkan rawa-rawa tulungagung membuangnya ke pantai selatan dengan membuat terowongan air menembus dasar gunung Tanggul, salah satu gunung dari rangkaian pegunungan yang melindungi Tulungagung dari dasyatnya ombak pantai selatan, yang terkenal dengan sebutan terowongan ni yama. Terowongan tersebut sekarang dijadikan PLTA Tulungagung (Dok.sejarah Kabupaten Tulungagung,2013).

#### **b. Kondisi Geografis**

Tulungagung yang memiliki luas wilayah 1055,65 km<sup>2</sup> dan secara astronomis terletak antara 111 – 112 bujur timur dan 7 – 8 lintang selatan. Kabupaten Tulungagung terbagi 19 kecamatan yaitu kecamatan besuki dengan 10 desa, kecamatan bandung dengan 18 desa, kecamatan Pakel dengan 19 desa, kecamatan Campurdarat dengan 9 desa, kecamatan Tanggunggunung dengan 7

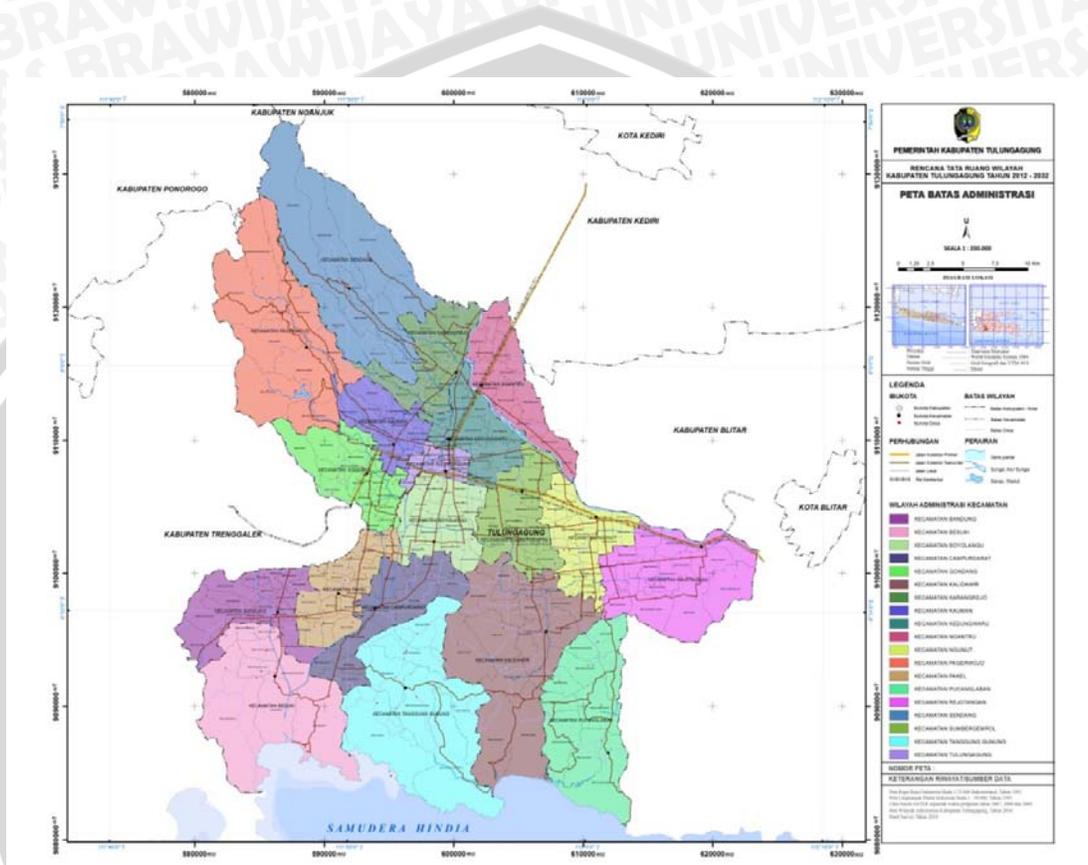
desa, kecamatan Kalidawir dengan 17 desa, kecamatan Pucanglaban dengan 9 desa, kecamatan Rejotangan dengan 16 desa, kecamatan Ngunut dengan 18 desa, kecamatan Sumbergempol dengan 17 desa, kecamatan Boyolangu dengan 17 desa, kecamatan Tulungagung dengan 14 kelurahan, kecamatan Kedungwaru dengan 19 desa, kecamatan Ngantru dengan 13 desa, kecamatan Karangrejo dengan 13 desa, kecamatan Kauman dengan 13 desa, kecamatan Gondang dengan 20 desa, kecamatan Pagerwojo dengan 11 desa, dan kecamatan Sendang dengan 11 desa.

Secara administratif wilayah Kabupaten Tulungagung berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri
  - b. Sebelah Timur : Kabupaten Blitar
  - c. Sebalah Selatan : Samudera Indonesia
  - d. Sebelah Barat : Kabupaten Trenggalek
- (Dok. Tulungagung Dalam Angka 2013)



**Gambar 4.1**  
**Peta Kabupaten Tulungagung**



Sumber : Dok.Tulungagung Dalam Angka 2013

**c. Kondisi Demografis**

Data kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan karena penduduk merupakan subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan. Data penduduk dapat diperoleh melalui beberapa cara yaitu melalui sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei-survei kependudukan.

Menurut hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung dilihat dari penyebarannya, diantara 19 kecamatan yaitu kecamatan besuki 33.900 jiwa, kecamatan bandung 42.216 jiwa, kecamatan Pakel 47.873, kecamatan

Campurdarat 53.755 jiwa, kecamatan Tanggunggunung 23.343 jiwa, kecamatan Kalidawir 63.541 jiwa, kecamatan pucanglaban 21.883 jiwa, kecamatan rejtangan 70.262 jiwa, kecamatan Ngunut 74.949 jiwa, kecamatan Sumbergempol 63.761 jiwa, kecamatan Boyolangu 76.499 jiwa, kecamatan Tulungagung 65.123 jiwa, kecamatan kedungwaru 85.389 jiwa, kecamatan Ngantru 52.276 jiwa, kecamatan Karangrejo 39.038 jiwa, kecamatan Kauman 49.087 jiwa, kecamatan Gondang 53.999 jiwa, kecamatan Pagerwojo 30.018 jiwa, dan kecamatan Sendang 43.246 jiwa (Dok.Tulungagung Dalam Angka 2013).

**Tabel 4.1.**

**Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Jumlah Penduduk Kabupaten  
Tulungagung Hasil Sensus Penduduk 2010**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Sensus Penduduk Tahun 2000	Sensus Penduduk Tahun 2010	Laju Pertumbuhan Penduduk / Tahun	Kepadatan Penduduk / Km <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6	7
1	Besuki	82,16	31.952	33.900	0,61	447
2	Bandung	41,96	40.229	42.216	0,49	1.154
3	Pakel	36,06	44.154	47.873	0,84	1.451
4	Campurdarat	39,56	48.762	53.755	1,02	1.402
5	Tanggunggunung	117,73	21.502	23.343	0,86	217
6	Kalidawir	97,81	61.856	63.541	0,27	712
7	Pucanglaban	82,94	21.217	21.883	0,31	321

1	2	3	4	5	6	7
8	Rejotangan	66,49	65.489	70.262	0,73	1.135
9	Ngunut	37,70	69.558	74.949	0,78	2.089
10	Sumbergempol	39,28	58.964	63.761	0,81	1.674
11	Boyolangu	38,44	68.323	76.499	1,20	1.965
12	Tulungagung	13,67	63.191	65.123	0,31	5.069
13	Kedungwaru	29,74	78.323	85.389	0,90	2.914
14	Ngantru	37,03	47.564	52.276	0,99	1.491
15	Karangrejo	35,54	37.854	39.038	0,31	1.130
16	Kauman	30,84	47.623	49.087	0,31	1.690
17	Gondang	44,02	52.779	53.999	0,23	1.280
18	Pagerwojo	88,22	29.025	30.018	0,34	349
19	Sendang	96,46	41.468	43.246	0,43	494
Jumlah		1.055,65	929.833	990.158	0,65	993

Sumber : Dok.Tulungagung Dalam Angka 2013

Tabel 4.1 diatas merupakan tabel yang menjelaskan mengenai kondisi demografis / data kependudukan Kabupaten Tulungagung yang di dalamnya terdapat 19 kecamatan yang masing-masing telah dijabarkan pada tabel 4.1.

#### **d. Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Tulungagung**

**"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Dalam Suasana  
Kerukunan dan Kebersamaan Melalui Pembangunan DIHATIKU  
INGANDAYA"**

Visi ini memiliki makna sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat adalah merupakan tujuan akhir dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
2. Kerukunan dan kebersamaan adalah merupakan sifat utama serta modal dasar masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan yang ingin dicapai secara konsisten dan berkesinambungan;
3. Dihatiku Ingandaya adalah merupakan sebuah arah pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran terhadap potensi-potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tulungagung.

Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung , sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah yang berbasis dihatiku ingandaya dengan mendorong pertumbuhan investasi dan pemberdayaan potensi masyarakat;
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan sosial budaya melalui usaha pencapaian pembangunan manusia;
3. Meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan;
4. Mewujudkan insan pembangunan yang beriman dan bertaqwa guna menjamin pencapaian masyarakat maju dan mandiri yang berkeadilan sosial;
5. Meningkatkan derajat kehidupan politik yang demokratis, yang didukung oleh terpeliharanya ketertiban, ketentraman di masyarakat serta tegaknya supremasi hukum.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Tulungagung, antara lain adalah:

1. Partisipasi, yaitu keterlibatan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan publik serta dalam setiap tahapan pembangunan secara bertanggungjawab.
2. Demokrasi, yaitu manajemen pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat yang dilandasi dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.
3. Transparansi, yaitu ketersediaan berbagai informasi kebijakan publik dan pembangunan yang memadai bagi masyarakat.
4. Akuntabilitas, yaitu kemampuan mempertanggungjawabkan seluruh aktifitas dan kewenangan yang di dimiliki kepada masyarakat.

#### **e. Gambaran umum PDRB Kabupaten Tulungagung**

PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu diciptakan akibat timbulnya berbagai aktifitas ekonomi dalam suatu wilayah regional. PDRB tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam

mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dari dua sumber daya tersebut bila dikelola dengan baik dan tepat akan menghasilkan nilai tambah yang luar biasa besar. PDRB dapat juga digunakan untuk melihat besaran nilai tambah dari masing-masing sector ekonomi sehingga dapat dilihat sektor-sektor yang berperan dalam pembentukan perekonomian daerah. Sehingga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui besarnya produksi barang dan jasa adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

**Tabel 4.2**  
**PDRB Kabupaten Tulungagung Tahun 2008-2012**

Tahun	Atas dasar harga berlaku	Atas dasar harga konstan
2008	12.982.491,62	6.936.741,79
2009	14.562.606,82	7.353.502,89
2010	16.298.065,42	7.829.889,53
2011 *)	18.337.587,08	8.357.114,68
2012 **)	20.634.456,30	8.941.209,47

Sumber: BPS Kabupaten Tulungagung

Keterangan: \*) Angka perbaikan

\*\*\*) Angka sementara

Melihat tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa, mulai tahun 2008 hingga 2012 perekonomian di Kabupaten Tulungagung selalu mengalami peningkatan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai total PDRB, baik itu dari PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. Peningkatan yang lebih tajam pada PDRB atas dasar harga berlaku

dibandingkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan adanya perubahan nilai rupiah atau inflasi. Namun demikian tetap menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Tulungagung dalam kondisi stabil. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah (RPJPD) yang dimulai tahun 2005 sampai dengan 2030 menunjukkan berjalan pada rel yang benar sehingga pembangunan di sektor ekonomi dapat dikatakan cukup mantap walau mulai tahun 2008 terjadi krisis global.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kabupaten Tulungagung tahun 2012, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2011 sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar Rp 5.669,246 milyar menjadi Rp 6.445,890 milyar pada tahun 2012 untuk penghitungan atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk penghitungan PDRB untuk harga dasar harga konstan, mengalami kenaikan dari Rp 2.724,112 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 2.987,355 milyar pada tahun 2012. Sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi paling kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya yaitu sebesar Rp 193,043 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 209,690 milyar pada tahun 2012 untuk penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Sedangkan untuk penghitungan PDRB untuk harga dasar harga konstan sektor listrik, gas dan air bersih memberikan kontribusi sebesar Rp 109,297 milyar pada tahun 2011 menjadi Rp 116,008 milyar pada tahun 2012.

#### 4.1.2 Gambaran Umum Situs Penelitian

##### a. Sejarah Singkat BPKAD Kabupaten Tulungagung

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah satuan kerja pemerintah daerah adalah salah satu pendukung kinerja kepala daerah. Dengan kata lain BPKAD kabupaten Tulungagung ini bertugas untuk membantu tugas Bupati Tulungagung dalam menyelesaikan tanggung jawabnya. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Satuan kerja ini dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah sekretaris daerah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Sebelum berdiri sendiri BPKAD Kabupaten Tulungagung ini masuk dalam instansi Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah dan Keuangan Daerah (DPPKAD). Pada tahun 2008 BPKAD berdiri sendiri berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 5 tahun 2008 yang mengatur organisasi dan tata kerja dinas daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja maka pada tahun 2012 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dipisah menjadi dua, yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah. Karena pemisahan instansi tersebut maka tugas, fungsi dan tata kerja BPKAD Kabupaten Tulungagung diatur kembali melalui Peraturan Bupati Tulungagung nomor 57 tahun 2011. Menurut Peraturan Bupati fungsi BPKAD antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

#### **b. Struktur organisasi BPKAD Kabupaten Tulungagung**

Menurut peraturan Bupati Tulungagung nomor 57 tahun 2011, susunan organisasi BPKAD Kabupaten Tulungagung sebagai berikut:

- i. Kepala Badan
- ii. Sekretariat, dalam pelaksanaannya membawahi:
  - i. Subbagian umum
  - ii. Subbagian Keuangan
  - iii. Subbagian Bina Program
- iii. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, dalam pelaksanaannya membawahi:
  - i. Subbagian Pengelolaan Kas
  - ii. Subbidang Perbendaharaan
- iv. Bidang Akuntansi, dalam pelaksanaannya membawahi:
  - i. Subbidang evaluasi
  - ii. Subbidang Perbendaharaan
- v. Bidang Anggaran, dalam pelaksanaannya membawahi:
  - i. Subbidang anggaran 1
  - ii. Subbidang Anggaran 2

- vi. Bidang Aset, dalam pelaksanaannya membawahi:
  - i. Subbidang Analisa Kebutuhan dan inventarisasi
  - ii. Subbidang Pengamanan dan Pemanfaatan
- vii. Kelompok Jabatan Fungsional (profil BPKAD Kabupaten Tulungagung).

### **c. Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Tulungagung**

#### **1. Kepala Badan**

Kepala BPKAD memiliki tugas pokok memimpin, membina, mengawasi, dan mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut di atas, maka kepala badan memiliki fungsi:

- a) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan badan.
- b) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan keuangan dan kekayaan atau aset daerah.
- c) Perencanaan program pengembangan dan pengelolaan keuangan dan kekayaan aset daerah
- d) Perencanaan program pengembangan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati.

## 2. Sekretariat

Bagian ini dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggung jawab kepala badan. Bidang sekretariat berfungsi menyelenggarakan administrasi serta ketatausahaan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan badan, serta pembinaan hukum, organisasi dan tata pelaksanaan badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, maka berikut adalah fungsi dari bagian sekretariat:

- a) Pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga dan protokol badan.
- b) Penyusunan program dan perencanaan badan
- c) Penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi, dan tata laksana badan.
- d) Pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bagian sekretariat memiliki tiga sub bagian antara lain sub bagian umum, sub bagian bina program, dan sub bagian keuangan. Masing-masing sub bagian tersebut memiliki tugas sebagai berikut:

### i. Sub bagian umum

1. Melakukan urusan administrasi persuratan, kearsipan, pelaksanaan perjalanan dinas, keprotokoleran, dan rumah tangga.

2. Menyiapkan bahan pelaporan administrasi kepegawaian.
3. Menyiapkan bahan pembinaan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan badan.
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

ii. Sub bagian Bina Program

1. Menyiapkan bahan penyusunan laporan dan perencanaan kegiatan badan.
2. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan badan.
3. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

iii. Sub bagian keuangan:

1. Melakukan tata usaha dan administrasi keuangan dan perlengkapan.
2. Menyusun analisa kebutuhan pengadaan dan melakukan administrasi barang.
3. Melakukan pembayaran gaji pegawai.
4. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Masing-masing sub bagian diatas dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

### 3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan, menyiapkan bahan pedoman teknis, melaksanakan pengelolaan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian di bidang pengelolaan kas dan perbendaharaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka bagian ini memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan pengeluaran kas.
- b) Pelaksanaan pembukuan dan administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang berupa kas dan setara kas.
- c) Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah.
- d) Pengelolaan utang dan piutang daerah.
- e) Penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas.
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang perbendaharaan dan kas daerah ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Dalam kinerja sehari-hari, bidang ini dibagi dalam dua sub bidang yaitu sub bidang pengelolaan kas dan sub bidang perbendaharaan. Masing-masing sub bagian memiliki tugas sebagai berikut:

- i. Sub Bidang Pengelolaan Kas
  1. Meneliti dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah.
  2. Menyusun anggaran kas.
  3. Menyiapkan surat penyediaan dana untuk pengendalian pelaksanaan anggaran kas.
  4. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji.
  5. Melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas.
  6. Memeriksa, menganalisis, dan mengevaluasi pertanggungjawaban pendapatan atau penerimaan kas.
  7. Menyusun dan menyediakan laporan penerimaan dan pengeluaran kas.
  8. Melakukan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas.
  9. Melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah.
  10. Melaksanakan pengelolaan piutang dan utang daerah.
  11. Menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik.
  12. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
  13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

ii. Sub Bidang Perbendaharaan

1. Melaksanakan register atas Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja SKPD.
2. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran dan meneliti dokumen SPM.
3. Melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D.
4. Meneliti dan memberikan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ non gaji.
5. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pungutan pihak ketiga.
6. Melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas.
7. Menyusun dan membuat laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D.
8. Meneliti kelengkapan dokumen dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran.
9. Melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait serta melakukan pembinaan perbendaharaan terhadap SKPD.
10. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

Masing-masing sub bidang tersebut dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

4. Bidang Akuntansi

Bidang ini memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang evaluasi pembukuan dan pelaporan. Untuk

melaksanakan tugas tersebut, maka bidang akuntansi memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Perumusan prosedur penatausahaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- b) Penyusunan pedoman teknis penatausahaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
- c) Penyajian informasi keuangan.
- d) Pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban, dan laporan keuangan daerah.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala badan.

Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pertanggungjawabannya kepada kepala badan. Dalam pelaksanaannya bagian ini dibagi menjadi dua sub bagian yaitu sub bidang evaluasi serta sub bidang pembukuan dan pelaporan. Berikut adalah tugas dari masing-masing sub bidang:

- i. Sub Bidang Evaluasi
  1. Melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional.
  2. Menyiapkan bahan pembinaan teknis terhadap bendahara.
  3. Menyiapkan bahan penerima peringatan atau teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional.
  4. Menyiapkan bahan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah.
  5. Menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).
  6. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
  7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

## ii. Sub Bidang Pembukuan

1. Melakukan pembukuan penerimaan dan pengeluaran APBD secara transparan dan akuntabel.
2. Mengadakan pencermatan pelaksanaan realisasi anggaran.
3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.
5. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembuatan laporan keuangan daerah.
6. Melakukan konsolidasi atau rekonsiliasi laporan keuangan dari seluruh SKPD.
7. Melakukan konsolidasi atau rekonsiliasi laporan keuangan dari seluruh BUMD.
8. Menyiapkan bahan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah.
9. Melaksanakan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah.
10. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
11. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepala bidang.

Setiap sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

## 5. Bidang Anggaran

Bidang anggaran memiliki tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan dan pedoman teknis di bidang anggaran. Untuk melaksanakan tugas tersebut maka berikut adalah fungsi bidang anggaran:

- a) Perumusan prosedur penyusunan rancangan APBD serta rancangan perubahannya.
- b) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran.
- c) Pengendalian penyusunan anggaran.
- d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh kepala badan.

Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Terdapat dua sub bagian pada bidang ini antara lain sub bidang anggaran I dan sub bidang anggaran II.

### i. Sub Bidang Anggaran I

1. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada dinas daerah dan kecamatan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada dinas daerah dan kecamatan.
3. Melaksanakan ferifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/ DPPA-SKPD pada dinas daerah dan kecamatan.
4. Menyiapkan bahan penyusunan standar harga satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenaan.
5. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai bidangnya.

6. Meleksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

ii. Sub Bidang Anggaran II

1. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan.
2. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perencanaan anggaran daerah pada inspektorat, sekretariat DPRD, badan, kantor, dan bagian lingkup sekretariat daerah.
3. Menyiapkan bahan penyusunan rencana belanja daerah pada inspektorat, sekretariat DPRD, badan, kantor, dan bagian lingkup sekretariat daerah.
4. Melaksanakan verifikasi RKA/ RKPA-SKPD dan DPA/ DPPA-SKPD pada inspektorat, sekretariat DPRD, badan, kantor, dan bagian lingkup sekretariat daerah.
5. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/ DPPA-SKPD pada inspektorat, sekretariat DPRD, badan, kantor, dan bagian lingkup sekretariat daerah.
6. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran pembiayaan daerah.
7. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya.
8. Meleksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

Pada bidang ini dipimpin oleh seorang kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

## 6. Bidang Aset

Bidang aset mempunyai tugas untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan pedoman teknis dibidang analisa kebutuhan, inventarisasi, pengamanan, dan pemanfaatan aset. Berikut adalah fungsi dari bidang aset:

- a) Penyusunan neraca kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- b) Penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah.
- c) Penyelenggaraan pemanfaatan pemindahtanganan, pengamanan, dan pengendalian barang milik daerah.
- d) Penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan.

Bidang aset dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Bidang ini dibagi menjadi dua sub bagian yaitu sub bidang analisa kebutuhan dan investasi serta sub bidang pengamanan dan pemanfaatan. Berikut adalah tugas dari masing-masing sub bagian:

- i. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Investasi
  1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
  2. Menyiapkan bahan penyusunan daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
  3. Menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang.
  4. Melakukan penatausahaan barang milik daerah.

5. Melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah.
  6. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- ii. Sub Bidang Pengamanan Barang Milik Daerah
1. Melakukan pengamanan barang milik daerah.
  2. Melakukan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah.
  3. Melakukan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah.
  4. Mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang.
  5. Melakukan penertiban penggunaan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah.
  6. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
  7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Bagian ini terdiri dari beberapa staf dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahlian dan dikoordinir oleh tenaga fungsional senior. Jumlah tenaga kerja ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Pembinaan terhadap tenaga kerja fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (profil BPKAD Kabupaten Tulungagung).

#### d. Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Tulungagung

##### Visi

**"Terwujudnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Akuntabel melalui Peningkatan Pelayanan di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah"**

##### Misi

1. Mengoptimalkan PAD dan meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perpajakan dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya;
2. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan administrasi bidang keuangan dengan mengkoordinasikan bahan perumusan kebijakan program, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan penatausahaan administrasi barang, mengendalikan dan mengamankan aset daerah.

#### 4.2 Penyajian Data Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung serta kinerja keuangan daerah selama 5 (lima) tahun. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung tahun 2009-2013 dan APBD Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2009-2013.

Berdasarkan data-data keuangan daerah Kabupaten Tulungagung 2009-2013 tersebut diperoleh:

##### 4.2.1 Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Mengetahui kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tulungagung ditinjau melalui dua perspektif yaitu perspektif pendapatan dan belanja daerah.

### 1. Derajat Otonomi Fiskal (DOF)

Kemampuan keuangan Kabupaten Tulungagung jika ditinjau dari perspektif pendapatan daerah diketahui melalui Derajat Otonomi Fiskal (DOF) dengan mengukur perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD). Data Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Tulungagung tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

#### **Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-2013**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>TPD</b>	<b>DOF%</b>	<b>KATEGORI DOF</b>
2009	63.777.515.348,00	927.555.849.242,00	06,87%	Sangat Kurang
2010	80.894.725.191,00	1.098.597.607.443,24	07,36%	Sangat Kurang
2011	106.954.202.154,00	1.291.587.463.219,00	08,28%	Sangat Kurang
2012	130.767.710.167,07	1.523.718.069.611,00	08,58%	Sangat Kurang
2013	145.743.994.076,50	1.747.067.628.193,50	08,34%	Sangat Kurang

Sumber:Dok.BPKAD Kabupaten Tulungagung 2014 (data diolah)

Dapat dilihat pada tabel 4.3 diatas, merupakan data yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah yang ditinjau melalui perspektif pendapatan. Kemampuan keuangan daerah yang ini diukur melalui perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah (TPD).

Hasil pengukuran rasio derajat otonomi fiskal menunjukkan kemampuan keuangan daerah, seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Persentase Derajat Otonomi Fiskal (DOF) sebesar 0,00% hingga 10,00% dikategorikan sangat kurang mampu, selanjutnya kemampuan keuangan

daerah di kategorikan kurang berkisar antara 10,01% hingga 20,00%, dikategorikan sedang dengan persentase 20,01% hingga 30,00%, kemampuan daerah cukup jika persentasenya antara 30,01% hingga 40,00%, di kategorikan mampu jika persentase DOF sebesar 40,01% hingga 50,00%, dan jika persentasenya diatas 50,00% kemampuan keuangan daerah dikatakan sangat mampu.

Berdasar data yang diperoleh dan telah diolah menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal mulai tahun 2009-2013 masih dalam kategori sangat kurang mampu walaupun selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Derajat otonomi fiskal tahun 2009-2013 hanya berada dalam interval 0,00% hingga 10,00% yang tergolong dalam kategori sangat kurang mampu. Hal ini ditanggapi oleh Bapak Eko Sudharmono selaku Kepala Bidang Keuangan BPKAD Kabupaten Tulungagung mengatakan:

“secara umum, kemampuan keuangan yang ditinjau dari Derajat Otonomi Fiskal, hampir setiap daerah dalam kategori kurang mampu, bahkan sangat kurang mampu. Hampir seluruh Indonesia, porsi dana baik dari pusat maupun provinsi masih sangat mendimonsidari total pendapatan daerah karena salah satu tujuan otonomi daerah adalah pemerataan pembangunan, jadi beberapa jenis pajak yang merupakan urusan pusat itu kaan dikembalikan pada daerah dalam bentuk dana bagi hasil”  
(wawancara, 1 mei 2014 di kantor BPKAD Kab.Tulungagung).

Pada tahun 2009, Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Tulungagung hanya sebesar 06,87% dimana jumlah PAD Kabupaten Tulungagung hanya sebesar Rp 63.777.515.348,00 dari total seluruh pendapatan Rp 927.555.849.242,00. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tulungagung hanya bisa memberikan kontribusi PAD sebesar 06,87% dari seluruh total pendapatan.

Tahun 2010, berdasarkan tabel Derajat Otonomi Fiskal adalah sebesar 07,36%, dengan jumlah PAD sebesar Rp 80.894.725.191,00 dan total Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.098.597.607.443,24. Pada tahun ini pemerintah Kabupaten Tulungagung mampu meningkatkan pendapatan sehingga memberikan kontribusi PAD terhadap seluruh total pendapatan Daerah sebesar 07,36%. Pada tahun ini peningkatan Derajat Otonomi Fiskal sebesar 0,49%, dimana tahun 2009 Derajat Otonomi Fiskal sebesar 06,87%.

Pada tahun 2011, Derajat Otonomi Fiskal pada tahun ini juga mengalami peningkatan sebesar 0,92% dimana mampu memberikan 08,28% dari jumlah PAD sebesar Rp 106.954.202.154,00 dan total pendapatan sebesar Rp 1.291.587.463.219,00. Hal ini, pada tahun 2011 pemerintah kabupaten Tulungagung mampu memberikan kontribusi sebesar 08,28% saja.

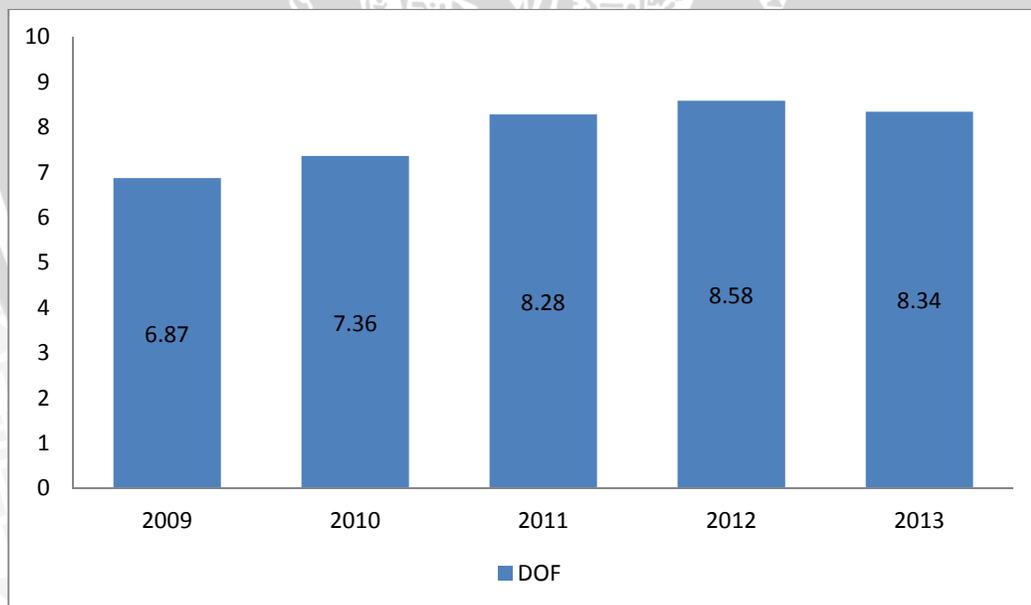
Tahun 2012, Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan lagi meskipun tidak terlalu besar dimana persentasenya sebesar 08,58%, dimana peningkatan ini dipicu oleh peningkatan total realisasi PAD sebesar Rp 130.767.710.167,07 dan dari total pendapatan sebesar Rp 1.523.718.069.611,07. Namun peningkatan ini belum mampu membawa Kemampuan Keuangan Kabupaten Tulungagung keluar dari kategori sangat kurang mampu karena masih dibawah 10,00%.

Pada tahun 2013, Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan sebesar 0,24% dimana pemerintah Kabupaten Tulungagung hanya mampu memberikan kontribusi PAD sebesar 08,34% dari seluruh total penerimaan pendapatan daerah. Penurunan persentase ini disebabkan oleh

peningkatan total pendapatan dan peningkatan jumlah PAD yang tidak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Setiap tahunnya Kabupaten Tulungagung selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah perolehan PAD dengan menggali sumber-sumber potensi PAD yang ada di Kabupaten Tulungagung. Salah satu cara yang dilakukan agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah adalah memaksimalkan terhimpunnya pajak yang dilakukan dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang perpajakan.

Grafik Kemampuan Keuangan Kabupaten Tulungagung yang ditinjau melalui perspektif pendapatan daerah tahun anggaran 2009-2013 dapat ditunjukkan melalui gambar 4.3 berikut:



Gambar 4.3: Perkembangan DOF Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2009-2013

Sumber: Data diolah, 2014

Gambar 4.3 diatas, menunjukkan bahwa perkembangan Derajat Otonomi Fiskal yang terjadi di Kabupaten Tulungagung pada setiap tahunnya mengalami peningkatan yang mungkin tidak selalu tinggi. Bisa dilihat pada tahun 2013, DOF mengalami penurunan sebesar 0,24%, namun pada tahun-tahun sebelumnya selalu mengalami peningkatan. Namun, pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung selalu mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang mereka kelola sampai saat ini.

## 2. Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

Selain melalui perspektif pendapatan daerah, kemampuan keuangan daerah juga dilihat dari belanja daerah yang ditunjukkan dengan Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah. IKR menunjukkan sejauh mana kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah. Belanja rutin daerah terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan.

Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kabupaten Tulungagung 2009-2013 dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.4

**Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2009-2013**

Tahun	PAD	Belanja Rutin	IKR	Kategori IKR
2009	63.777.515.348,00	968.592.263.706,32	06,58 %	Sangat kurang
2010	80.894.725.191,00	1.180.329.574.349,00	06,85 %	Sangat kurang
2011	106.954.202.154,00	1.366.465.673.329,70	07,82 %	Sangat kurang
2012	130.767.710.167,07	1.629.699.300.040,03	08,02 %	Sangat kurang
2013	145.743.994.076,50	1.833.800.293.804,87	07,94 %	Sangat kurang

Sumber : dok.BPKAD Kab. Tulungagung,2014 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam hal pembiayaan Belanja Rutin oleh dana Pendapatan Asli Daerah. Kemampuan keuangan daerah ini meninjau sejauh mana peranan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah. Indeks Kemampuan Rutin ini diperoleh dari perbandingan antara jumlah perolehan PAD terhadap jumlah belanja rutin daerah.

Hasil pengukuran rasio Indeks Kemampuan Rutin (IKR) daerah ini menunjukkan tingkat kemampuan keuangan daerah dan mengetahui sejauh mana kontribusi PAD terhadap sisi pengeluaran daerah. Persentase Indeks Kemampuan Rutin (IKR) sebesar 0,00% sampai 10,00% dikategorikan sangat kurang mampu, 10,01% sampai 20,00% dikategorikan kurang, dikategorikan sedang mampu jika persentasenya 20,01% sampai 30,00%, kemampuan daerah dikatakan cukup mampu jika persentasenya berkisar antara 30,01% sampai 40,00%, jika

persentasenya sebesar 40,01% sampai 50,00% dikategorikan mampu, dan jika persentasenya mencapai diatas 50,00% maka dikategorikan sangat mampu. Jika dilihat dari tabel, dapat diketahui bahwa Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulungagung pada tahun 2009-2013 masih tergolong sangat kurang mampu, masih pada kisaran 0,00% hingga 10,00%.

Pada tahun 2009, PAD Kabupaten Tulungagung hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 06,58% terhadap total belanja rutin daerah, dimana PAD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 63.777.515.348,00 sedangkan total belanja rutin tahun 2009 adalah sebesar Rp 968.592.263.706,32 dan dapat dikatakan pada tahun ini kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah dikatakan sangat kurang mampu.

Tahun 2010, Kabupaten Tulungagung masih sangat kurang mampu dalam memberikan kontribusi yang cukup dalam membiayai belanja rutin daerahnya. Namun pada tahun ini kontribusi jumlah PAD mengalami peningkatan meskipun hanya sedikit saja yaitu sebesar 0,27%. Dengan begini PAD Kabupaten Tulungagung memberikan kontribusi sebesar 06,85% saja. Hal ini bahwa PAD Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 80.894.725.191,00 sedangkan total belanja rutin daerah sebesar Rp 1.180.329.574.349,00.

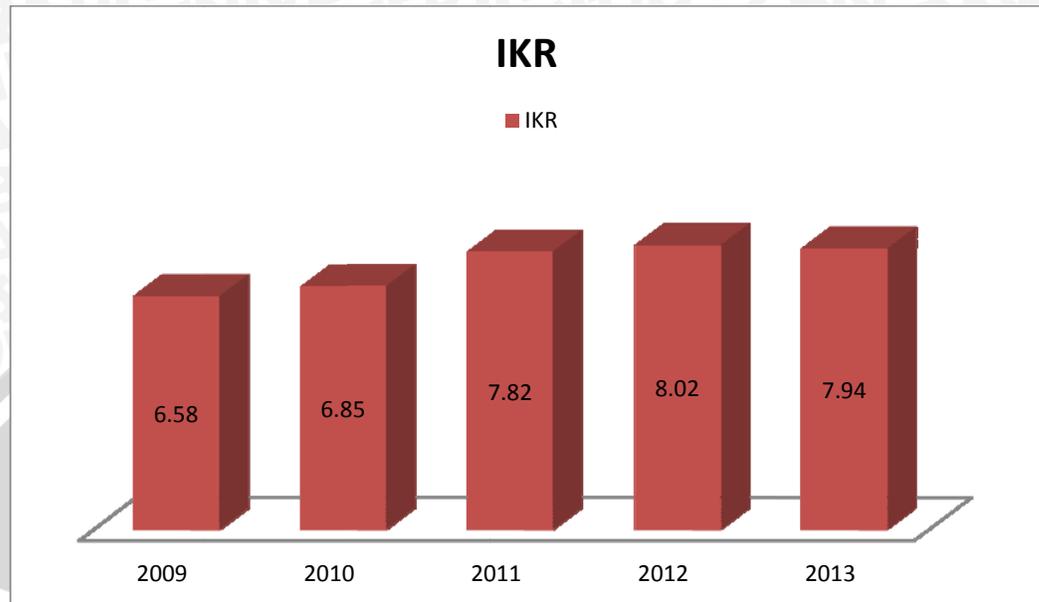
Pada tahun 2011, Kemampuan PAD dalam membiayai belanja rutin daerah mengalami kenaikan lagi sebesar 0,97% dimana jumlah PAD sebesar Rp 106.954.202.154,00 dan mampu memberikan kontribusi sebesar 07,82% dari seluruh total belanja rutin yang berjumlah Rp 1.366.465.673.329,70. Pada tahun

ini mengalami peningkatan yang cukup besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun 2012, total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 130.767.710.167,07 sedangkan total belanja rutin Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 1.629.699.300.040,03. Indeks Kemampuan Rutin tahun 2012 08,02% yang artinya pada tahun ini mampu memberikan kontribusi sebesar 08,02% dalam pembiayaan belanja rutin daerah. Tahun ini mengalami peningkatan lagi sebesar 0,20% saja. Namun jika dilihat pada setiap tahunnya mengalami peningkatan tetap saja pada tahun ini masih dikategorikan sangat kurang mampu.

Dan pada tahun 2013, Indeks Kemampuan Rutin Kabupaten Tulungagung justru mengalami penurunan sebesar 0,08% yang hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 07,94% saja dari total PAD sebesar Rp145.743.994.076,50 sedangkan total belanja rutin daerah sebesar Rp 1.833.800.293.804,87. Jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan namun disisi lain total belanja rutin juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, inilah yang menyebabkan kontribusi pada tahun ini mengalami penurunan.

Grafik kemampuan Keuangan Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari pembiayaan rutin daerah anggaran 2009-2013 dapat ditunjukkan melalui:



Gambar 4.4: perkembangan IKR Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2009-2013

Sumber: Data Diolah, 2014

Jika dilihat pada gambar 4.4, perkembangan IKR Kabupaten Tulungagung mengalami peningkatan pada setiap tahunnya, namun jika dilihat peningkatannya yang terjadi pada setiap tahunnya tidak selalu tinggi. Namun pemerintah Kabupaten Tulungagung akan selalu berusaha akan lebih meningkatkan kemampuannya dalam membiayai dan menggali kembali dimana sumber-sumber yang bisa menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung.

#### 4.2.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung

Kinerja keuangan yang berfungsi untuk mengukur prestasi atau tingkat pencapaian keberhasilan suatu daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Kinerja keuangan daerah ini dilihat melalui beberapa analisis rasio keuangan antara lain:

rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio aktivitas, rasio pertumbuhan, dan analisis pembiayaan daerah.

#### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung yang ditinjau dari besarnya perbandingan jumlah PAD dengan total sumbangan dan bantuan keuangan dari pihak lain. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.5**

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun anggaran 2009-2013**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>Sumbangan Pemerintah</b>	<b>Kemandirian</b>	<b>Pola Hubungan</b>
2009	63.777.515.348,00	849.035.918.894,00	7,51%	Instruktif
2010	80.894.725.191,00	960.549.808.770,24	8,42%	Instruktif
2011	106.954.202.154,00	1.144.768.020.775,00	9,34%	Instruktif
2012	130.767.710.167,07	1.321.447.157.304,00	9,89%	Instruktif
2013	145.743.994.076,50	1.551.702.275.564,00	9,39%	Instruktif

Sumber : Dokumen BPKAD Kabupaten Tulungagung 2014 (data diolah)

Melalui perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah, akan diketahui pola hubungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini dilihat dari persentase kemandirian keuangan daerah dimana persentase 0-25% memiliki pola hubungan yang instruktif yang artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Persentase 25-50% memiliki pola yang konsultatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

Pada persentase 50-70% memiliki pola hubungan yang partisipatif yang artinya peran pemerintah pusat semakin berkurang karena sudah dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi. Dan persentase 75-100% bisa dikatakan delegatif dimana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah benar-benar telah mampu untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah.

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun 2009 hanya mencapai 7,51%. Hal ini dikarenakan jumlah bantuan sebesar Rp 849.035.918.894,00 sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 63.777.515.348,00. Besarnya dana bantuan menyebabkan rendahnya persentase kemandirian keuangan daerah tahun ini yang membuat hubungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung berpola instruktif. Disini peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Pada tahun 2010, tingkat kemandirian keuangan daerah pada tahun ini hanya sebesar 8,42%. Meskipun terjadi peningkatan sebesar 0,91% namun pola hubungan yang terjadi masih tetap instruktif, ini dikarenakan jumlah bantuan yang didapat sebesar Rp 960.549.808.770,24 sedangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 80.894.725.191,00. Selain Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, namun total bantuan juga mengalami peningkatan yang cukup besar, inilah yang menyebabkan kemandirian peningkatan daerah hanya naik 0,91%.

Tahun 2011, pada tahun ini terjadi peningkatan tingkat kemampuan keuangan daerah yang ditandai dengan peningkatan indeks kemandirian hingga

0,92% sehingga pada tahun ini tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung sebesar 9,34%. Hal ini terjadi karena jumlah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 106.954.202.154,00 sedangkan total bantuan sebesar Rp 1.144.768.020.715,00 sehingga pada tahun ini tingkat kemandirian daerah mengalami peningkatan kembali.

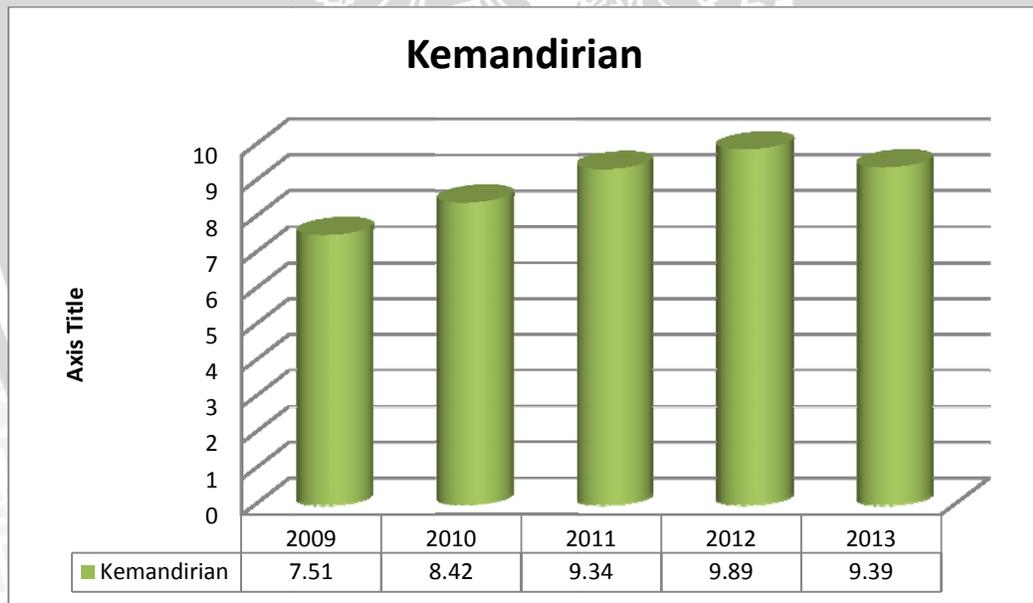
Tahun 2012, tingkat kemandirian keuangan daerah meningkat kembali sebesar 0,55%. Namun hal ini belum bisa merubah pola hubungan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang tetap masih berpola instruktif yang artinya pemerintah pusat masih mendominasi dari kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung. Hal ini disebabkan oleh Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung tahun ini sebesar Rp 130.767.710.167,07 sedangkan total bantuannya sebesar Rp 1.321.447.157.304,00 sehingga pada tahun ini tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Tulungagung hanya sebesar 9,89%.

Dan pada tahun 2013, indeks kemandirian keuangan mengalami penurunan sebesar 0,50% dari tahun lalu sebesar 9,89% pada tahun ini menjadi 9,39% saja. Ini dikarenakan total bantuan pada tahun ini sebesar Rp 1.551.702.275.564,00 sedangkan total Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung sebesar Rp 145.743.994.076,50 . Pada setiap tahun selalu mengalami peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah maupun pada total bantuan yang didapat, inilah yang menyebabkan penurunan nilai indeks kemandirian keuangan daerah.

Dari hasil wawancara pada 1 mei 2014 di kantor BPKAD Kabupaten Tulungagung, menurut Bapak Eko Sudharmono menyatakan bahwa:

“pendapatan daerah Kabupaten Tulungagung memang didominasi oleh dana dari pusat. Namun, akan selalu diusahakan dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan sumber-sumber yang ada. Meningkatnya sumber dana dari pusat ini sudah ditentukan oleh indikator- indikator yang telah ada dari pemerintah pusat dan sudah jelas berapa besarnya yang akan diberikan dalam satu tahun anggaran” (1 Mei 2014).

Dari penyajian data diatas, selama 5 (lima) tahun anggaran 2009-2013 tingkat kemandirian keuangan daerah selalu mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2013 yang mengalami penurunan. Namun bisa dikatakan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung cenderung stabil. Peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung selama 5 (lima) tahun anggaran dapat digambarkan pada grafik berikut :



Gambar 4.5 : Peningkatan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Tulungagung

Sumber :Data diolah,2014

Tingkat kemandirian yang ditunjukkan oleh grafik diatas bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Ini merupakan usaha yang dilakukan oleh para pegawai yang selalu ingin berusaha meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam permasalahan pembiayaan yang ada di Kabupaten Tulungagung. Namun jika dilihat pada grafik tersebut, pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan , namun bisa dikatakan bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tulungagung cenderung stabil.

#### **b. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah**

Rasio ini menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan seluruh sumber Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan. Dalam mengukur keefektifan Pendapatan Asli Daerah dalam kurun waktu anggaran tertentu digunakan menggunakan perbandingan antara jumlah realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah. Tingkat keefektifan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Anggran 2009-2013 dapat ditunjukkan melalui tabel berikut :

**Tabel 4.6**

#### **Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Tulungagung T.A 2009-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Pagu Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efektivitas</b>
2009	55.657.128.744,00	63.777.515.348,00	114,59%
2010	70.955.464.623,00	80.894.725.191,00	114,00%
2011	86.403.714.812,00	106.954.202.154,00	123,78%
2012	110.502.917.775,25	130.767.710.167,07	118,33%
2013	121.702.681.962,87	145.743.994.076,50	119,75%

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Tulungagung (Data diolah)

Dari penyajian diatas, selama 5 tahun anggaran 2009-2013 tingkat keefektifan PAD bisa dikatakan cukup stabil. Dilihat dari pagu anggaran dengan realisasi anggaran selalu melampaui dari yang telah ditargetkan. Disini bisa memperlihatkan bahwa, pemerintah mampu menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dari data yang telah diperoleh menunjukkan bahwa setiap tahunnya mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2013, telah dapat direalisasikan 100%. Meskipun pada tahun 2010 dan 2012 mengalami penurunan pada tingkat keefektifan, namun meskipun mengalami penurunan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan tetap tercapai.

Tingkat keefektifan Pendapatan Asli Daerah Kabupten Tulungagung pada tahun 2009 dimana target Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan adalah sebesar Rp 55.657.128.744,00 dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang didapat adalah sebesar Rp 63.777.515.348,00. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini dikatakan efektif karena mencapai persentase 114,59%.

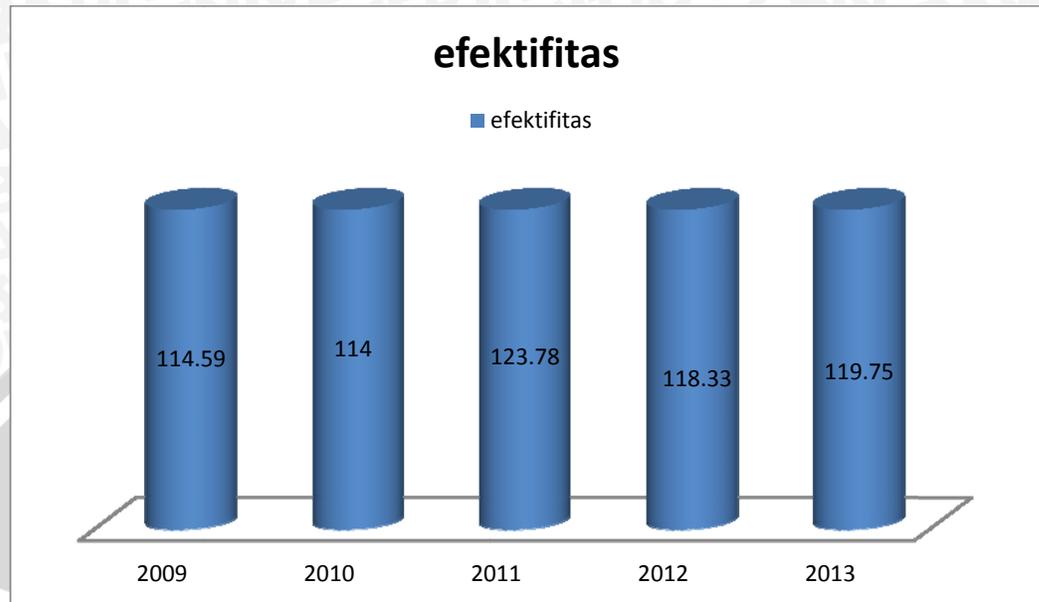
Pada tahun 2010, keefektifan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung mengalami sedikit penurunan. Namun jumlah Pendapat Asli Daerah yang telah ditargetkan dapat dicapai dengan baik. Dimana Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 70.955.464.623,00 dan ternyata dapat terealisasi sebesar Rp 80.894.725.191,00. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini dikatan efektif, yaitu sebesar 114,00%.

Tahun 2011, tingkat efektifitasnya meningkat menjadi 123,78% dimana ini bisa dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dari jumlah Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sementara sebesar Rp 86.403.714.812,00 dan Pendapatan Asli Daerah dapat terealisasi sebesar Rp 106.954.202.154,00.

Pada tahun 2012, keefektifan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan, dari 123,78% menjadi 118,33%. Namun jumlah Pendapat Asli Daerah yang telah ditargetkan dapat dicapai dengan baik. Dimana Pendapatan Asli Daerah yang ditargetkan sebesar Rp 110.502.917.775,25 dan ternyata dapat terealisasi sebesar Rp 130.767.710.167,07. Hal ini juga menunjukkan bahwa jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun ini dikatan efektif, yaitu sebesar 114,00%, meskipun tingkat efektifitas mengalami penurunan.

Dan pada tahun 2013, peningkatan tingkat efektifitas perolehan Pendapatan Asli Daerah tidak sebesar tahun 2011 lalu, dimana tahun ini hanya meningkat sebesar 1,42% dari 118,33% menjadi 119,75%. Disini indeks efektifitas dapat dikatakan sangat efektif karena dapat mencapai 100%. Peningkatan ini terjadi dikarenakan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 121.702.681.962,87 dan realisasinya mencapai Rp 145.743.994.076,50.

Perkembangan Rasio Efektivitas PAD mulai tahun anggaran 2009-2013 dapat ditunjukkan melalui diagram berikut:



Gambar 4.6: Perkembangan Rasio Efektifitas PAD Kabupaten Tulungagung T.A 2009-2013

Sumber: data diolah, 2014

Pada gambar diatas, menunjukkan bahwa perkembangan efektifitas yang ada di Kabupaten Tulungagung dikatakan cukup stabil. Pemerintah telah menunjukkan bahwa kemampuannya untuk menggali sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan dengan baik. Hal ini bisa dilihat bahwa pada setiap tahunnya keefektifan Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami peningkatan. Namun dengan demikian pemerintah tidak boleh terlalu puas dengan apa yang diperoleh saat ini, pemerintah daerah harus tetap berusaha lebih baik lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung.

### c. Rasio Aktivitas Keuangan

Rasio aktivitas keuangan digunakan untuk melihat bagaimana kinerja Kabupaten Tulungagung mengalokasikan keuangan daerahnya. Rasio ini diukur

dengan membandingkan jumlah masing-masing belanja operasi dengan belanja modal dengan total belanja pada tahun berjalan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio aktivitas keuangan meliputi rasio masing-masing komponen belanja daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2009-2013:

**Tabel 4.7**  
**Rasio Aktivitas Keuangan Daerah**

Tahun	Belanja Operasi	Rasio Belanja Operasi	Belanja Modal	Rasio Belanja Modal
2009	Rp 690.239.553.455,32	35,61%	Rp 278.352.710.251,00	14,36%
2010	Rp 825.056.482.455,00	60,63%	Rp 355.273.091.894,00	26,11%
2011	Rp 917.373.949.510,70	33,56%	Rp 449.091.723.819,00	16,43%
2012	Rp 1.063.735.339.781,07	32,63%	Rp 565.963.960.258,96	17,36%
2013	Rp 1.270.297.691.873,62	34,63%	Rp 563.502.601.931,25	15,36%

Sumber: Dokumen BPKAD Kabupaten Tulungagung, 2014 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.7 rasio aktivitas keuangan diatas, jumlah belanja operasi dan belanja modal mempunyai indeks yang tidak stabil. Ada kenaikan dan penuruann yang tidak stabil pada setiap tahunnya. Belanja operasi yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, sedangkan belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung, belanja bangunan, belanja jalan belanja aset.

Pada tahun 2009 rasio belanja operasi Kabupaten Tulungagung sebesar 35,61% dari seluruh total belanja daerah tahun ini. Total belanja rasio pada tahun ini adalah sebesar Rp 690.239.553.455,32. Sedangkan rasio belanja modal tahun ini sebesar 14,36% daro total belanja daerah dimana belanja modal tahun ini

sebesar Rp 278.352.710.251,00. Disini bisa dilihat bahwa pada tahun 2009 didominasi oleh belanja operasi daerah.

Rasio belanja pada tahun 2010 mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,02% dari 35,61% namun pada tahun ini menjadi 60,63% ini didominasi oleh belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan untuk rasio belanja modal pada tahun ini adalah sebesar 26,11%, rasio belanja modal pada tahun ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 11,75%.

Pada tahun 2011, porsi belanja operasi sebesar Rp 917.373.949.510,70. Disini rasio belanja operasi mengalami penurunan dari yang sebelumnya sebesar 60,63% namun pada tahun ini menjadi 33,56%. Disini porsi belanja mengalami peningkatan, namun jumlah APBD yang didapat pada tahun ini juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Sedangkan rasio belanja modal pada tahun ini sebesar 16,43% dari porsi belanja sebesar Rp 449.091.723.819,00. Pada tahun ini jumlah rasio masih tetap didominasi oleh rasio belanja operasi yaitu sebesar 33,56%.

Pada tahun 2012, indeks rasio belanja operasi mengalami penurunan sebesar 0,93% dari tahun sebelumnya sebesar 33,56% menjadi 32,63% dari porsi belanja sebesar Rp 1.063.735.339.781,07. Sedangkan indeks rasio belanja modal mengalami peningkatan sebesar 0,93% dari tahun sebelumnya menjadi 17,36% dari porsi belanja modal sebesar Rp 565.963.960.258,96. Namun pada tahun ini masih tetap rasio belanja operasi yang mendominasinya.

Pada tahun 2013, rasio belanja operasi mengalami peningkatan namun rasio belanja modal mengalami penurunan. Rasio belanja operasi meningkat sebesar 2,00% sedangkan rasio belanja modal juga mengalami penurunan sebesar 2,00%. Pada tahun ini rasio belanja operasi sebesar 34,63% dari total seluruh belanja daerah dan rasio belanja modal sebesar 15,36% dari seluruh total belanja daerah.

Dari tahun 2009 sampai 2013, belanja operasi masih mendominasi sebagian besar belanja daerah hampir 75% dari total seluruh belanja daerah dialokasikan pada belanja operasi. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Eko Sudharmono yang menyatakan :

“Tren belanja daerah pada tahun ke tahun pasti nya akan mengalami peningkatan, terutama pada belanja operasi. perlu diketahui bahwa hampir separuh dari APBD dianggarkan untuk belanja pegawai dan setiap tahunnya selalu ada pegawai yang naik jabatan, peningkatan jumlah jabatan. Namun disisi lain akan berusaha untuk meningkatkan komponen belanja modal, seperti gedung, jalan dan fasilitas lainnya, agar nantinya bisa seimbang” (wawancara, 01 mei 2014).

Tren pertumbuhan belanja operasi dan belanja modal tahun anggaran 2009-2013 akan digambarkan pada diagram berikut:

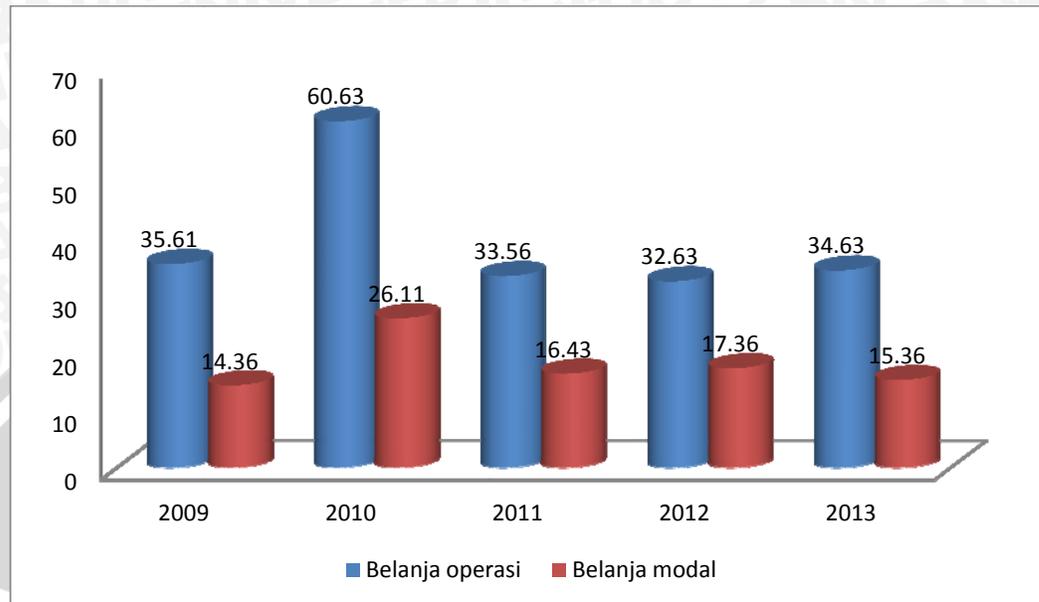


Diagram 4.7: Perkembangan Rasio Aktivitas Kabupaten Tulungagung 2009-2013

Sumber : Data Diolah, 2014

Gambar 4.7 menunjukkan perkembangan rasio aktivitas keuangan pada Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan gambar diatas, belanja operasi maupun belanja modal mempunyai grafik yang tidak stabil. Ada kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya, dan belanja operasi jauh lebih tinggi dari belanja modal. Seharusnya keduanya bisa berjalan dengan seimbang, namun ini juga mengingat kebutuhan yang ada pada pemerintah Kabupaten Tulungagung.

#### d. Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)

Rasio pertumbuhan ini digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari tahun ke tahun. Dengan diketahui pertumbuhan masing-masing komponen dengan dievaluasi maka akan diketahui

komponen mana yang perlu mendapatkan perhatian. Tabel ini akan menampilkan pertumbuhan PAD, Pendapatan Daerah, Belanja Operasi dan Belanja Modal.

**Tabel 4.8**

**Rasio Pertumbuhan Keuangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2009-**

**2013**

<b>Tahun</b>	<b>Rasio Pertumbuhan PAD</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin</b>	<b>Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan</b>
2009	-	-	-	-
2010	26,83%	18,44%	19,53%	27,63%
2011	32,21%	17,56%	11,18%	26,40%
2012	22,26%	17,97%	15,95%	26,02%
2013	11,45%	14,65%	19,41%	-0,43%

Sumber: Dokumen BPKAD, 2014 (Data Diolah)

Rasio pertumbuhan PAD diperoleh melalui perbandingan antara selisih perolehan PAD tahun berjalan dengan perolehan PAD tahun sebelumnya terhadap perolehan PAD tahun sebelumnya. Hal serupa juga terjadi pada perhitungan rasio pertumbuhan total pendapatan daerah yang diperoleh dari perbandingan antara selisih perolehan pendapatan daerah tahun berjalan dengan perolehan pendapatan daerah tahun sebelumnya terhadap perolehan pendapatan daerah tahun sebelumnya. Untuk memperoleh nilai rasio pertumbuhan belanja rutin/pembangunan daerah diperoleh melalui selisih perolehan belanja rutin/pembangunan daerah tahun berjalan dengan perolehan belanja rutin/pembangunan daerah tahun sebelumnya terhadap perolehan belanja rutin/pembangunan daerah tahun sebelumnya.

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, menunjukkan tren pertumbuhan dari realisasi pertumbuhan penerimaan PAD, realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja operasi, dan belanja modal mulai tahun 2009 hingga 2013 bisa dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan pada setiap rasio. Ini bisa dikatakan pertumbuhan keuangan Kabupaten Tulungagung tidak stabil. Pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2009 ke 2010, tingkat pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung mencapai besaran 26,83%. Dengan capaian realisasi PAD tahun 2009 sebesar Rp 63.777.515.348,00 mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar Rp 80.894.725.191,00. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2011 menjadi Rp 106.954.202.154,00 dimana menghasilkan rasio pertumbuhan dari tahun 2010-2011 adalah sebesar 32,21%.

Pada tahun 2012, PAD sebesar Rp 130.767.167,07 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang semula sebesar Rp 106.954.202.154,00. Hal ini mengakibatkan tren pertumbuhan PAD dari tahun 2011 ke 2012 adalah sebesar 22,26% jumlah realisasi PAD tahun 2013 sebesar Rp 145.743.994.076,50 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 130.767.710.167,07 pada tahun 2012. Hal ini mengakibatkan rasio pertumbuhan PAD pada tahun 2013 sebesar 11,45%.

Untuk rasio pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2009 ke 2010 adalah mencapai 18,44% dimana realisasi pendapatan daerah di tahun 2009 sebesar Rp 927.555.849.242,00 dan mengalami peningkatan di tahun 2010 menjadi Rp 1.098.597.607.443,24. Tahun 2010 ke 2011 rasio pertumbuhan

penerimaan daerah mengalami peningkatan menjadi Rp 1.291.587.463.219,00 dan memiliki rasio sebesar 17,56%.

Pertumbuhan realisasi pendapatan daerah tahun 2011 ke 2012 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan dari tahun 2011 ke 2012 adalah sebesar 17,97% dengan jumlah Rp 1.523.718.069.611,07. Pada tahun berikutnya, 2012 ke 2013 mengalami peningkatan sebesar 14,65% dengan realisasi pendapatan daerah sebesar Rp 1.747.067.628.193,50.

Untuk rasio pertumbuhan belanja rutin daerah dari tahun 2009 ke 2010 sebesar 19,53%, dari realisasi belanja rutin tahun 2009 sebesar Rp 690.239.553.455,32 menjadi Rp 825.056.482.455,00 pada tahun 2010. Untuk tahun 2010 ke 2011 pertumbuhan belanja rutin mengalami peningkatan menjadi Rp 917.373.949.510,70 memiliki rasio sebesar 11,18%.

Pertumbuhan belanja rutin daerah pada tahun 2011 ke 2012 sebesar 15,95%, dilihat dari realisasi belanja rutin tahun 2012 sebesar Rp 1.063.735.339.781,07, dan untuk tahun 2012 ke 2013 mengalami peningkatan rasio yang semula 15,95% menjadi 19,41% pada tahun 2013 dengan realisasi belanja rutin tahun 2012 sebesar Rp 1.063.735.339.781,07 menjadi Rp 1.270.297.691.873,62 pada tahun 2013.

Untuk pertumbuhan realisasi belanja modal daerah tahun 2009 ke 2010 memiliki rasio sebesar 27,63% dimana realisasi belanja modal pada tahun 2009 adalah sebesar Rp 278.352.710.251,00 dan mengalami peningkatan pada tahun 2010 menjadi Rp 355.273.091.894,00. Pada tahun 2010 berjalan ke 2011 mengalami peningkatan realisasi belanja modal yang pada tahun sebelumnya

sebesar Rp 355.273.091.894,00 pada tahun 2011 ini realisasi belnaja modal sebesar Rp 449.091.723.819,00 dan mengalami kenaikan rasio sebesar 26,40%.

Pertumbuhan belanja modal daerah pada tahun 2011 berjalan ke 2012 adalah sebesar 26,02% dimana realisasi belanja modal tahun ini sebesar Rp 565.963.960.258,96 dan pada tahun 2012 ke 2013 mengalami penurunan rasio belanja daerah sebesar -0,43% dengan realisasi rasio pada tahun ini sebesar Rp 563.502.601.931,25 sedakangkan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 565.963/960.258,96.

Pertumbuhan perolehan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Kabupaten Tulungagung tagung Anggaran 2009 sampai 2013 dapat digambarkan pada grafik berikut ini:

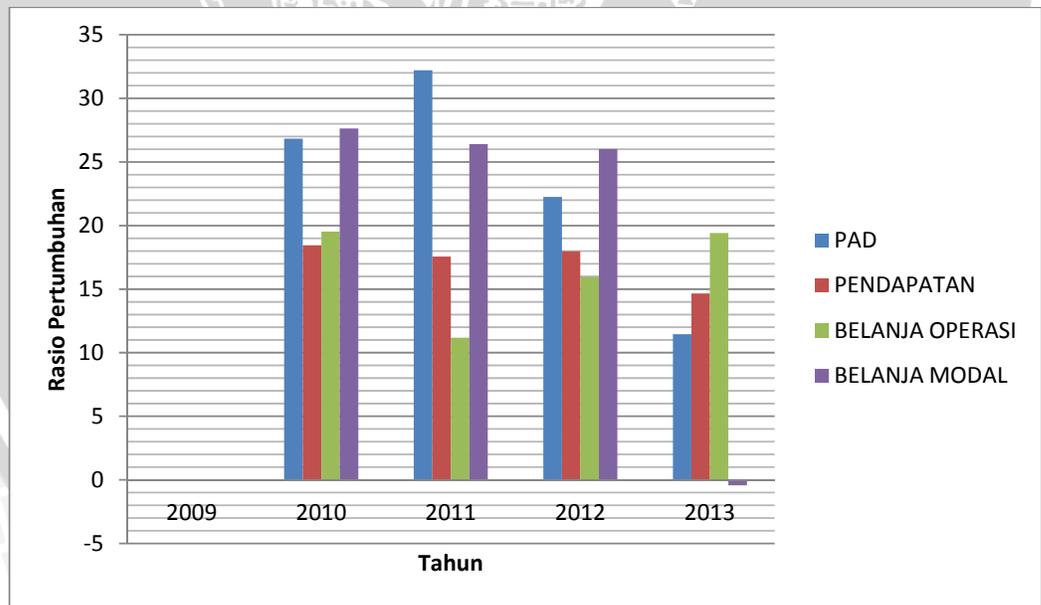


Diagram 4.8. Perkembangan Rasio Pertumbuhan Kabupaten Tulungagung T.A 2009-2013

Sumber : Data Diolah,2014

Pada gambar 4.8 dapat dilihat bahwa PAD, Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Modal selalu mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 PAD yang diperoleh sangat tinggi, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Jika melihat segi pendapatan, disini bisa dikatakan cukup stabil. Melihat dari belanja operasi maupun belanja modal bisa dikatakan tidak stabil pada segi belanja modal yang mengalami penurunan yang sangat drastis pada tahun 2013.

#### **e. Analisis Surplus / Defisit dan Pembiayaan Daerah**

Analisis surplus / defisit dan pembiayaan daerah ini digunakan untuk melihat perkembangan penerimaan ,pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan serta Selisih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun Anggaran 2009-2013. Tabel berikut ini akan menampilkan jumlah pagu anggaran dan Realisasi Surplus/defisit serta pembiayaan daerah tahun anggaran 2009-2013:

Tabel 4.9

Surplus / Defisit APBD, Pembiayaan Daerah Serta SILPA T.A 2009-2013

	2009		2010		2011		2012		2013	
	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi	Pagu Anggaran	Realisasi
pendapatan	856.095.02	927.555.8	965.950.33	1.098.597.	1.022.966.	1.291.587.4	1.301.169.	1.523.718.	1.397.432.	1.747.067.
raha	4.905,00	49.242,00	1.659,00	607.443,24	482.008,00	63.219,00	177.292,56	069.611,07	396.186,87	628.193,50
pendapatan	866.250.84	968.592.2	1.017.354.	1.180.329.	1.065.530.	1.366.465.6	1.354.884.	1.629.699.	1.408.194.	1.883.800.
raha	4.630,00	63.706,32	516.785,72	574.349,00	228.158,00	73.329,70	153.667,56	300.040,03	682.336,87	293.804,87
Surplus	(10.155.81	(41.036.41	(51.404.18	(81.731.96	(42.563.74	(74.878.210	(53.714.97	(105.981.2	(10.762.28	(86.732.66
defisit	9.725,00)	4.464,32)	5.126,72)	6.905,76)	6.150,00)	.110,70)	6.575,00)	30.428,96)	6.150,00)	5.611,37)
pendapatan	10.320.000	42.919.21	51.589.365	83.148.147	44.405.926	84.707.645.	65.199.156	127.068.41	13.762.286	94.042.665
biaya	.000,00	4.067,32	.401,72	.180,76	.425,00	697,70	.850,00	0.703,96	.150,00	.611,37
pendapatan	164.180.27	830.180.2	185.180.27	1.416.180.	1.842.180.	9.829.435.5	11.484.180	21.087.180	3.000.000.	7.310.000.
biaya	5,00	75,00	5,00	275,00	275,00	87,00	.275,00	.275,00	000,00	000,00
pendapatan	10.155.819	42.089.03	51.404.185	81.731.966	42.563.746	74.878.210.	53.714.976	105.981.23	10.762.286	86.732.665
biaya	.725,00	3.792,32	.126,72	.905,76	.150,00	110,70	.575,00	0.428,96	.150,00	.611,37
PA	0,00	1.052.619.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		328,00								

Sumber: Dokumen BPKAD, 2014 (Data Diolah)